

**RAPAT DENGAR PENDAPAT  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI  
DENGAN  
KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI**

*Kamis, 8 Maret 2012*

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;  
Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua***

**Yang terhormat:**

**Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Mengawali pertemuan rapat Dengar Pendapat, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perkenannya, kita hadir dan mengikuti acara ini. Sesuai dengan undangan yang kami terima dari wakil Ketua DPR-RI/KORPOLKAM Nomor AG/02224/DPR RI/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, ijinilah pada kesempatan ini kami menyampaikan topik sebagaimana diagendakan dalam undangan tersebut adalah : ***Pembahasan Perubahan RKA/KL Perubahan Tahun Anggaran 2012.***

Sebagaimana Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-01/MK.2/2011 tanggal 1 Nopember 2011 tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012, BPN RI mendapatkan alokasi pagu sebesar Rp. 3.957.875.318.000 (tiga trilyun sembilan ratus lima puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan BPN RI di seluruh Indonesia pada tahun 2012.

**Berdasarkan sumber dana** dalam penganggaran, anggaran BPN-RI tahun 2012 berasal dari sumber dana publik atau Rupiah Murni (RM) dan sumber dana yang berasal dari masyarakat atau PNBP. Anggaran sumber dana Rupiah Murni 63 %, sedangkan dari PNBP 37 %.

Sumber dana PNBP tersebut berasal dari sebagian penerimaan negara yang diijinkan untuk digunakan sebagai sumber dana berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Badan Pertanahan

Nasional. Sedangkan penerimaan PNBPN dimaksud berasal dari penerimaan PNBPN yang bersifat umum maupun PNBPN yang bersifat fungsional, sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pertanahan yang dilakukan oleh BPN RI. PNBPN yang bersifat fungsional tersebut berasal dari dana masyarakat yang mengajukan permohonan pelayanan kepada BPN RI dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

Target penerimaan PNBPN BPN RI Tahun 2012 sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu trilyun tujuh ratus milyar rupiah), sedangkan pagu belanja PNBPN sebesar Rp.1.452.874.333.000,- (satu trilyun empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

**Berdasarkan belanja**, anggaran BPN-RI terdiri dari Belanja pegawai sebesar 29 % untuk pembayaran gaji, tunjangan pegawai, Sedangkan Belanja Barang 62 % untuk belanja barang operasional dan non operasional dan Belanja Modal sebesar 9 % yang meliputi belanja modal peralatan, mesin, bangunan termasuk rehabilitasi kantor.

Apabila ditinjau dari perbandingan anggaran **antara pusat dan daerah**, pada tahun 2012 terdiri dari anggaran Pusat 12 % (yang terdiri Satu Satuan Kerja pusat terdiri atas 7 unit eselon I dan 32 unit eselon II) dan daerah 88 % (Terdiri atas 33 Kanwil. 1 Satker STPN dan 461 Kantor Pertanahan Kab/Kota)

Secara keseluruhan, penggunaan anggaran per program. baik yang bersifat prioritas maupun pendukung prioritas dapat kami sampaikan sebagai berikut :

**Tabel I. Alokasi Anggaran Tahun 2012**

KODE PROGRAM	PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PAGU ALOKASI ANGGARAN
056.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN RI	Rupiah Murni	1,587,346,461
		PNBP	203,877,269
		TOTAL	1,791,223,730
056.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN RI	Rupiah Murni	130,924,587
		PNBP	128,220,238
		TOTAL	259,144,825
056.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN RI	Rupiah Murni	10,000,000
056.04	Program Pengelolaan Pertanahan Nasional	Rupiah Murni	776,729,937
		PNBP	1,120,776,826
		TOTAL	1,897,506,763
JUMLAH		Rupiah Murni	2,505,000,985
		PNBP	1,452,874,333
			<b>3,957,875,318</b>

**Yang terhormat:**

**Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Pada tahun 2012, BPN RI melaksanakan prioritas nasional yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah yaitu pada prioritas Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Infrastruktur, Energi, Iklim dan Investasi serta Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, Dan Pasca-Konflik sebagaimana terinci pada tabel dibawah :

**Tabel II. Target Sasaran Prioritas Nasional BPN RI Tahun 2012**

No.	PRIORITAS NASIONAL	TARGET
	REFORMA AGRARIA	
1	Peta Pertanahan	3.242.574 Ha
2	Legalisasi Aset (Rupiah Murni)	908.283 bidang
	Legalisasi Aset (PNBP)	1.000.000 bidang
3	Neraca Penatagunaan Tanah	100 Kab/Kota
4	Redistribusi Tanah	149.600 bidang
5	Inventarisasi P4T	50.000 bidang
6	Konsolidasi Tanah	2.663 bidang
7	Peta Potensi Konsolidasi Tanah	100 Kab/Kota
8	Inventarisasi Wilayah Pesisir. Pulau-pulau kecil. Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)	184 SP
		(1 SP = 100 Ha)
9	penertiban tanah terindikasi terlantar	459 SP
		(1 SP = 100 Ha)
10	Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	10.564 Laporan

**Yang terhormat:**

**Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Menindaklanjuti hasil rapat RAPBN Tahun 2012 pada tanggal 28 Februari 2012 yang dipimpin Menko Perekonomian BPN RI menyampaikan saving sebesar Rp. 76.709.782.000,-. Saving dilakukan pada satuan kerja kantor Pusat dan Daerah yang meliputi Belanja pegawai transito, belanja barang operasional dan non operasional. Saving pada anggaran Unit eselon II Pusat merupakan pendukung kegiatan prioritas sedangkan pada Daerah adalah belanja non operasional dengan tidak mengurangi alokasi anggaran untuk kegiatan prioritas nasional. Angka sebesar tersebut diperoleh setelah mengutamakan kegiatan prioritas nasional di 468 satuan kerja Pusat dan daerah. Kegiatan prioritas tersebut agar tetap bisa

berjalan, dan juga pengadaan sarana prasarana fisik pertanahan serta manajerial yang mendukung pelayanan pertanahan dapat terlaksana. Adapun penjelasan lengkap atas anggaran yang di saving dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Satuan Kerja yang di saving meliputi Unit kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pusat
2. Satuan Kerja Unit Daerah yaitu Satuan Kerja Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Sedangkan anggaran program yang di saving meliputi :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Program Pengelolaan Pertanahan Nasional
3. Program Sarana dan Prasarana Aparatur BPN RI

Secara rincian program dan anggaran yang di saving sebagaimana tabel terlampir.

**Yang terhormat:**

**Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Pada tahun 2012, anggaran BPN-RI yang masih terdapat anggaran yang diblokir dan belum memperoleh persetujuan dari DPR RI yaitu pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, sebesar Rp.112.353.600.000,- (seratus dua belas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) meliputi Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) untuk pembangunan manajemen arsip modern dan Rp.62.353.600.000,- (enam puluh dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembangunan dan renovasi gedung kantor serta pengadaan peralatan dan mesin.

**Yang terhormat:**

**Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan sebagaimana dimaksud dalam acara undangan Rapat Dengar Pendapat. Selanjutnya kami mohon kiranya Yang Terhormat Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR-RI berkenan memberikan dukungan bagi terlaksananya program-program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Atas segala upaya dan dukungan yang diberikan oleh yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR-RI, kami menghaturkan terimakasih.

***Billahi Taufiq Wal Hidayah.  
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh***

**Jakarta. 8 Maret 2012  
AN. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA.  
Sekretaris Utama**

**MANAGAM MANURUNG. SH. MKn  
NIP. 19531015 198103 1 007**